

PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP KRIMINALITAS DI PROVINSI ACEH

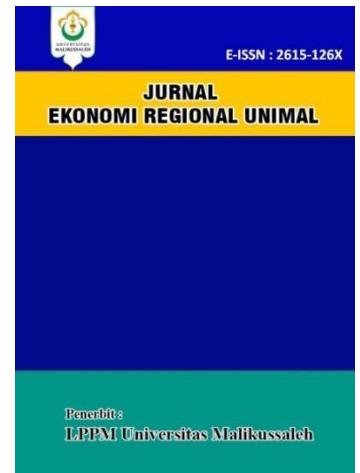
*^a Syarifah Syafira *^b Hasri Mawarni

* *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh*

Corresponding author:

asyarifahsyafira@unimal.ac.id

hasri.200430052@mhs.unimal.ac.id



ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Keywords:

Open Unemployment Level,

Poverty, income Inequality, and Crime

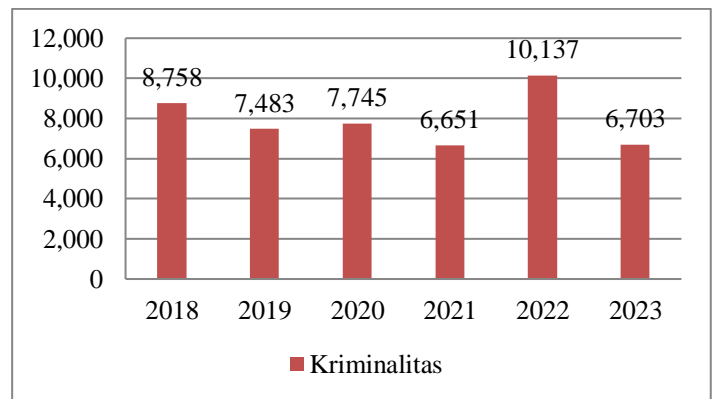
This research aims to determine the influence of open unemployment, poverty and income inequality on crime in Aceh Province. The data used in this research is secondary data in the form of a time series for 1999-2023 obtained from the Aceh Central Statistics Agency. The data analysis method uses multiple linear regression. The research results show that the level of open unemployment and income inequality have a positive and insignificant effect on crime in Aceh Province. Meanwhile, poverty has a negative and significant effect on crime in Aceh Province. Simultaneously, the level of open unemployment, poverty and income inequality have a significant effect on crime in Aceh Province.

1. PENDAHULUAN

Kriminalitas di Indonesia masih sering terjadi dan termasuk salah satu bentuk tindak kejahatan yang dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Aksi kejahatan tersebut dapat dilakukan secara individu, kelompok, ataupun komunitas yang tujuannya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat yang diterima dari tindakannya tersebut. Tingkat pelaporan masyarakat mengenai tindak kejahatan juga masih tergolong rendah sehingga kondisi penurunan data kriminalitas masih belum dapat menggambarkan keseluruhan kejadian yang dialami secara riil oleh masyarakat (Audey, 2019).

Kemajuan zaman dan cepatnya perubahan yang terjadi secara masif membuat sebagian individu atau kelompok sulit untuk menyesuaikan diri, kemampuan dan pengetahuannya. Di samping itu, lapangan kerja yang sulit menyebabkan banyaknya pengangguran. Kelompok angkatan kerja yang ingin bekerja, tetapi belum beruntung mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Desakan ekonomi, keluarga, dan kemiskinan membuat banyak dari

pengangguran yang mencari jalan pintas yang negatif yaitu melakukan tindak kriminalitas (Saputra 2023).



Sumber : BPS Provinsi Aceh (2024)

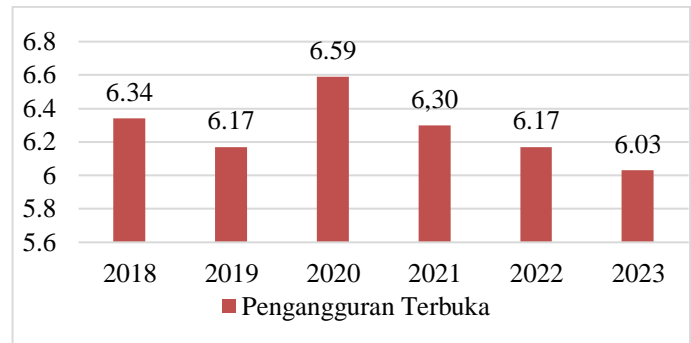
Gambar 1. 1 Kriminalitas di Provinsi Aceh 2018 – 2023 (Ribu Kasus)

Berdasarkan Gambar 1.1 kriminalitas di Provinsi Aceh 2018 – 2023 mengalami fluktuasi di setiap tahun nya. Pada tahun 2018 kriminalitas di Aceh sebesar 8.758 kasus, dan mengalami penurunan tahun 2019 yaitu 7.483 kasus, hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu peningkatan kerjasama antara

masyarakat dan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan program-program pencegahan kriminalitas yang digalakkan oleh pemerintah daerah, termasuk penyuluhan tentang hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian pada tahun 2021 sampai tahun 2022 sebesar 10,137 kasus. Kasus kriminalitas pada tahun 2022 didominasi dengan kasus pencurian ringan mencapai 283 kasus, disusul pencurian biasa 641 kasus, penggelapan 25 kasus, penganiayaan 922 kasus, sementara kasus lainnya di dominasi dengan kasus narkoba dan tindak kekerasan. Selanjutnya pada tahun 2023 tingkat kriminalitas mengalami penurunan yang signifikan sebesar 6.703 kasus karena daerah dengan jumlah penduduk yang padat kontrol lingkungannya lebih besar dan tingkat pengawasan keamanan yang tinggi sehingga tercipta rasa aman dari tindak kriminalitas bagi orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut.

Orang kelas bawah memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi dari kelompok lainnya. Orang yang berpenghasilan rendah, pengangguran, berpendidikan rendah jauh lebih mungkin melakukan tindak kejahatan. Pengangguran merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, terutama negara berkembang dan negara miskin, di mana individu tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi juga menjadi indikator lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini mencerminkan kesulitan keuangan yang dialami oleh individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mendorong beberapa orang untuk mencari jalan pintas, bahkan sampai melakukan tindakan kriminal. Banyaknya pengangguran akan berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat sehingga dapat menyebabkan masalah sosial seperti kriminalitas (Kurniawati, 2024).

Pengangguran terbuka tergambar dari besarnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimana TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat pada suatu daerah maupun negara. Salah satu provinsi yang memiliki angka tertinggi jumlah pengangguran terbuka adalah Provinsi Aceh. Pengangguran yang terjadi dalam perekonomian dapat memberikan dampak terhadap negara dan masyarakat (Sartika 2022). Berikut perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.



Sumber : BPS Provinsi Aceh (2024)

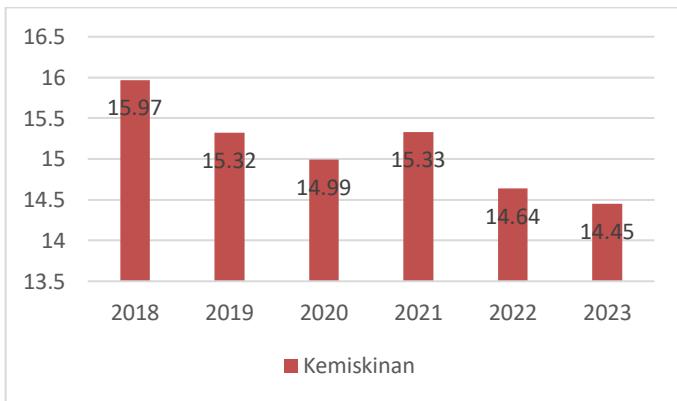
Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh 2018 –2023 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.2 Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh tahun 2018 – 2023 mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pada tahun 2018 jumlah pengangguran sebesar 6,34 % mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 6,17% di karenakan Upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dan juga program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dapat membantu mengurangi pengangguran dengan meningkatkan kemampuan individu untuk bersaing di pasar kerja. Kemudian pada tahun 2020 pengangguran di Aceh meningkat sebesar 6,59% akibat adanya pandemi COVID -19 yang dimulai pada tahun 2020 telah berdampak besar terhadap perekonomian global dan nasional. Pandemi ini menyebabkan penurunan aktivitas bisnis, penutupan usaha, dan penurunan jumlah pekerjaan, sehingga meningkat angka pengangguran di Provinsi Aceh. Kemudian pada tahun 2021-2023 pengangguran di Aceh kembali mengalami penurunan hingga mencapai 6,03% tahun 2023, hal ini memperlihatkan adanya pemulihan ekonomi di aceh yang menyebabkan lebih banyak perusahaan kembali beroperasi atau memperluas, usahanya, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Provinsi Aceh masih menduduki peringkat pertama dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera yang di susul oleh Provinsi Bengkulu di peringkat kedua, dan Provinsi Sumatera Selatan peringkat ketiga. Banyak faktor yang mendasari mengapa Aceh bisa ditetapkan sebagai provinsi termiskin di Sumatera, seperti krisis pasca konflik, masih ketergantungan terhadap sumber daya alam, serta kurangnya kualitas terhadap pendidikan dan infrastruktur (BPS 2023).

Kemiskinan adalah masalah sosial yang sampai sekarang masih sulit dipecahkan. Manusia akan menghalalkan segala cara ketika kondisi keuangannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab itu kemiskinan bisa memberikan dampak besar

terhadap terjadinya kriminalitas. Kemiskinan termasuk faktor yang memengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat kriminalitas. Pemerintah bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berinovasi agar menciptakan peluang peningkatan penyerapan tenaga kerja, sehingga berkurangnya pengangguran dan terciptanya kesejahteraan masyarakat, tingkat kriminalitas serta untuk program-program yang telah ada perlu ditingkatkan dan pemerataannya di seluruh daerah baik pelosok maupun perkotaan (Nisa, 2024). Berikut perkembangan kemiskinan di Provinsi Aceh.



Sumber : BPS Provinsi Aceh (2024)

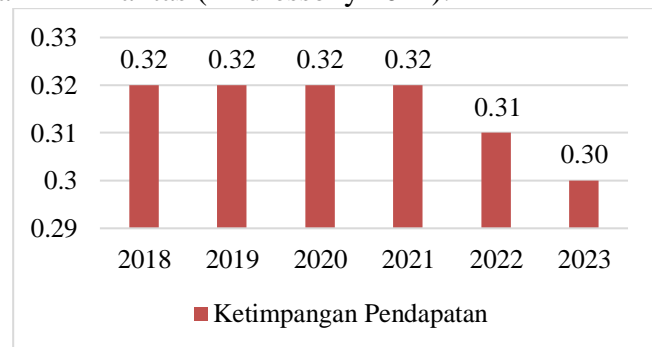
Gambar 1. 3 Kemiskinan di Provinsi Aceh 2018-2023 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami penurunan setiap tahun, kecuali pada tahun 2021 meningkat sebesar 15,33% diakibatkan oleh adanya pandemi Covid- 19 yang melanda Provinsi Aceh yang mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan. Peningkatan angka pengangguran ini juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Pada tahun 2022 kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami penurunan diangka 14,64%, salah satu faktor pendukung terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin Aceh menurut hasil Kerangka Sampel Area (KSA) yaitu terhadap produksi padi di Aceh pada bulan maret 2022, naik menjadi 249,190 ton atau sebesar 63,66%, dibandingkan september 2021 sebanyak 152.260 ton. Kenaikan produktivitas hasil panen padi terjadi secara menyeluruh, disebabkan karena keberhasilan pengembangan berbagai jenis bibit padi berproduktivitas tinggi. Selanjutnya pada tahun 2023 kemiskinan menurun sebesar 14,45%. Ini berarti bahwa penduduk Aceh memiliki pengeluaran yang lebih tinggi, sehingga lebih sedikit orang yang berada di bawah garis kemiskinan.

Di tengah peningkatan kriminalitas, angka kemiskinan di Aceh menurun pada tahun 2022.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Aceh mengalami penurunan berkat pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dengan meningkatnya aktivitas masyarakat pasca-pandemi, peluang untuk melakukan kejahatan juga meningkat, meskipun secara bersamaan lapangan kerja bertambah. Walaupun terjadinya penurunan kemiskinan, mungkin masih ada di kalangan individu yang merasa tidak mendapatkan manfaat penuh dari pemulihan ekonomi (Nurjannah 2018).

Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah kriminalitas. Setiap individu yang mengalami ketidaksuksesan dalam hidupnya akan semakin tertekan ketika dihadapkan dengan kesuksesan masyarakat di sekitarnya. Dan jika semakin tinggi ketimpangan di wilayah tersebut, maka semakin besar tekanan yang dialami individu dan semakin besar peluang individu untuk melakukan kejahatan. Ketimpangan pendapatan yang diterima oleh setiap individu dengan individu lainnya tidak dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kriminalitas. Hal ini dikarenakan besarnya ketimpangan pendapatan yang diterima oleh individu miskin dan apabila individu miskin mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka individu tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalitas. Akan tetapi apabila individu miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka akan melakukan tindakan kriminalitas (Andressony 2024).



Sumber : BPS Provinsi Aceh (2024)

Gambar 1. 4 Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh 2018 – 2023 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.4 ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh 2018-2023 memperlihatkan tren penurunan. Pada tahun 2018 – 2021 ketimpangan pendapatan Aceh sebesar 0,32%. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 0,31% dikarenakan pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan perbaikan, dengan beberapa laporan menyebutkan bahwa pertumbuhan ini berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan Selanjutnya, pada tahun 2023

ketimpangan pendapatan kembali menurun sebesar 0,30% . Penurunan presentase ketimpangan pendapatan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas pertanian.

Ketimpangan pendapatan merupakan distribusi pendapatan yang tidak proposional dari total pendapatan nasional di antara berbagai rumah tangga dalam negara. Semakin besar kesenjangan pendapatan, semakin besar perbedaan distribusi pendapatan yang menyebabkan disparitas pendapatan (Kunenengan, 2023). Berdasarkan penelitian Pamela (2023), ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Tindak kriminalitas lebih di dorong oleh besarnya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di suatu daerah, karena semakin besarnya frustrasi akibat ketimpangan akan memperbesar godaan untuk melakukan tindakan kejahatan.

Berdasarkan penelitian Nisa (2023), menyatakan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah kriminalitas, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah kriminalitas, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah kriminalitas. Sedangkan menurut penelitian Saputra (2023), menyatakan hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas mempunyai dampak negatif. Orang-orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit lebih besar kemungkinan untuk menjadi korban kegiatan kriminalitas. Pengangguran memiliki korelasi yang positif antara tingkat pengangguran dan tingkat kriminalitas. Ketika tingkat pengangguran meningkat, maka tingkat kriminalitas cenderung naik juga. Namun, hubungan ini tidak selalu bersifat kausal.

Terjadi peningkatan kriminalitas dan ketimpangan mengalami penurunan di Aceh pada tahun 2022. Fenomena ini terjadi karena aktivitas ekonomi yang kembali normal setelah pandemi berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, membantu mengurangi ketimpangan. Berbagai program bantuan sosial yang diterapkan oleh pemerintah juga berperan dalam mengurangi ketimpangan di masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi yang semakin lancar setelah pandemi juga berkontribusi pada peningkatan kegiatan manusia yang berpotensi peluang untuk melakukan kejahatan juga meningkat (Nurjannah 2024).

2. KAJIAN PUSTAKA

Kriminalitas

Kriminalitas berasal dari kata “*Crime*” yang

berarti kejahatan. Kriminalitas juga dapat diartikan sebagai tingkah laku yang dikategorikan sebagai penyimpangan sosial yang tidak diinginkan oleh siapapun. Teori Ekonomi kriminalitas Karl Max berpendapat bahwa kriminalitas muncul merupakan salah satu produk dan sistem ekonomi kapitalis. Backer (1968) merupakan salah satu pelopor yang melakukan kajian tentang kriminalitas dari pendekatan Ilmu Ekonomi. Dalam melakukan analisis, Becker melakukan pendekatan ekonomi seperti yang dilakukan oleh para ekonomi terdahulu terhadap setiap permasalahan sosial yang ada.

Tindak kriminalitas merupakan suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat diancam hukuman berdasarkan undang- undang atau KUHP yang berlaku di Indonesia (Masittah, 2018). Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, kesuksesan pembangunan yang diusahakan pemerintah oleh setiap negara sangat bergantung terhadap besar kecilnya hambatan dari kriminalitas, baik pembangunan sumber daya manusia itu sendiri maupun infrastruktur (Pasiza, 2018).

Menurut (Rosad , 2020) ada beberapa jenis kriminalitas sebagai berikut :

- 1) Pencurian. Pencurian merupakan berasal dari kata curi yaitu berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa ada izin dari pemiliknya. Pencurian melanggar Pasal 352 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.
- 2) Tindak Asusila. Asusila yaitu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat terutama dikalangan para remaja. Tindakan kriminal ini hukumannya penjara paling lama 2 tahun 8 bulan tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 Tahun penjara.
- 3) Pencopetan. Pencopetan memiliki pengertian yaitu kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet, tas, handphone milik orang lain atau yang bukan haknya dengan cepat atau buru-buru yang tidak di ketahui oleh korban maupun orang di sekitarnya. Tindakan ini memenuhi pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

- 4) **Penjambretan.** Penjambretan yaitu merupakan perbuatan atau tindakan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi yang begitu banyak bagi korban. Penjambretan ini memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara (Soenarto, 1994).
- 5) **Penodongan dengan senjata tajam/api** Bentuk kriminalitas ini adalah perampasan harta benda milik orang lain yang dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan dan menyerahkan semua harta benda yang dimiliki secara mendesak. Tindakan kriminalitas ini memenuhi Pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
- 6) **Penganiayaan.** Penganiayaan adalah pelaku dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit ataupun luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah keselamatan badan penganiayaan ini memenuhi pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman Hukuman pidana Penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- 7) **Pembunuhan.** Pembunuhan yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pengertian seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah yang dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dan atau semi sengaja. Tindakan kriminal pembunuhan tercantum dalam pasal 388 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan sanksi Hukuman Pidana mati atau Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu yang tertentu yang ditentukan oleh hakim, paling lama dua puluh tahun.
- 8) **Penipuan.** Penipuan adalah tindakan seseorang dengan pelaku dengan menipu rangkaian kebohongan, nama palsu keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita kebohongan yang seakan-akan terjadi dan benar-benar ada dan nyata.
- 9) **Korupsi.** Korupsi sebagai tingkah laku individu

atau seseorang yang menggunakan wewenang dan jabatan yang dimiliki guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi dalam pengertian sosiologi merupakan sebagai penggunaan yang korupsi dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam tanpa pengetahuan orang lain, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan menguntukan diri sendiri itu dengan sah. Tindakan pidana ini memenuhi pasal 209 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum pidana) dengan Hukuman 4 tahun penjara.

Pengangguran Terbuka

Pengangguran (tunakarya) ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Menurut Sukirno (2004) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Pengangguran terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup, tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Fenomena tersebut dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan masyarakat, khususnya terjadi pada lulusan baru universitas. Pengangguran juga diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami (Muslim, 2014).

Pengangguran terjadi karena ketidak sesuaian antara permintaan dan penyedia dalam pasar kerja, sehingga memunculkan pengangguran normal atau friksional, musiman, siklikan, struktural dan teknologi. Kemiskinan akan mempengaruhi perekonomian suatu daerah dan bagi individu masyarakat menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan, kehilangan keterampilan dan timbulnya penyakit masyarakat (Sari, 2021).

Menurut Audey, (2019) beberapa faktor penyebab pengurangan kebutuhan lapangan kerja di

atas tentu saja tidak akan memberikan keuntungan pada masyarakat., berikut dampak pengangguran terbuka:

1. Menyebabkan Kesenjangan Sosial

Salah satu dampak pengangguran terbuka adalah adanya kesenjangan sosial dengan para pencari kerja sering merasa tidak diperlakukan secara adil dalam lingkungan masyarakat. Ketidakadilan dalam konteks ini dapat dipahami dengan dua sudut pandang, yaitu terjadinya kecurangan penerimaan kerja melalui koneksi perusahaan atau stereotip buruk yang ditancapkan pada pengangguran.

2. Menurunkan Daya Saing dan Kemampuan

Dampak yang kedua adalah hilangnya keahlian calon pekerja karena terlalu lama tidak dipergunakan atau disalurkan pada bidang terkait. Hal ini tentu saja sangat disayangkan sebab untuk mendapatkan kemampuan tertentu pasti membutuhkan proses dan waktu lama.

3. Menambah Angka Kemiskinan

Meningkatnya angka kemiskinan juga merupakan dampak buruk. Dapat dibayangkan hal yang awam jika pekerjaan merupakan aspek pendukung ekonomi seseorang, maka dari itu tidak adanya pemasukan memicu ketidakstabilan finansial.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serut dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi (Rahayu 2018).

Kemiskinan depenisikan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersipat mendasar. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang di

gunakan adalah *Head Count Index* (HCI), yaitu jumlah presentase penduduk miskin yang berada di bawah kemiskinan. Garis kemiskinan diperoleh dari besarnya rupiah yang di belanjakan perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan non pangan. Kebutuhan minimum pangan ditetapkan patokan 2.100 kkal/kapita/hari seperti yang di anjurkan pada widya karya nasional pangan dan gizi. Sedangkan pengeluaran minimum untuk perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan, dan transport merupakan kebutuhan minimum non pangan yang harus di penuhi (Anung, 2015).

Putra, (2021) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Upah minimum dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan. Standar hidup masyarakat digambarkan melalui meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan dan bakat. pertumbuhan ekonomi akan terwujud kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran dan berdampak langsung pada tingginya kemiskinan (Primandhana,2022).

Secara konseptual, faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia (rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan), motivasi yang rendah, pandangan dalam hubungan kekeluargaan (cara pandang yang menganggap orang tua sebagai beban), terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai (gaji yang rendah dan waktu kerja yang banyak), dan tidak kreatif. Selanjutnya faktor-faktor yang keluar dari kemiskinan, secara konseptual yaitu berinvestasi atau menabung, taat beragama (tidak putus asa, memiliki harapan untuk berubah), membangun jaringan, dan dukungan dari pemerintah dan swasta. Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensi yang tidak dapat diselesaikan secara parsial saja. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah beserta semua komponen pembangunan yang didasarkan pada pemberdayaan dan potensi sumberdaya yang tersedia (Adawiyah,

2020).

Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat. Ini adalah angka antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (satu orang memiliki semua pendapatan). Dengan kata lain, semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat. Indeks Gini dihitung dengan menggunakan kurva Lorenz, yang menggambarkan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat. Kurva Lorenz adalah grafik yang menunjukkan persentase total pendapatan yang diterima oleh persentase populasi tertentu (Syamsuddin, 2011).

Menurut pendapat Smith dan Todaro (2006) Ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan enggag meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Ketimpangan pendapatan identik menjadi masalah yang sering di hadapi oleh negara berkembang. Ketimpangan pendapatan yang cenderung tinggi dan ekstrim jika tidak segera diatasi akan menimbulkan terjadinya gejolak sosial di masyarakat seperti tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, kesenjangan yang semakin parah antara golongan kaya dan miskin, dan penanganan maupun perbaikan yang semakin sulit dengan ketimpangan yang cenderung ekstrim (Subrata 2018).

Menurut Utami, (2022) beberapa dampaknya ketimpangan pendapatan antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata
Ketimpangan pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, karena sebagian besar penduduk yang memiliki pendapatan tinggi tidak menggunakan uang mereka untuk meningkatkan produksi dan investasi, sedangkan sebagian lainnya yang memiliki pendapatan rendah tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya.
2. Pengangguran dan kemiskinan
Ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan pengangguran dan kemiskinan, karena sebagian besar penduduk yang memiliki

pendapatan rendah tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan menjamin kehidupan mereka.

3. Inefisiensi penggunaan sumber daya
Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan inefisiensi penggunaan sumber daya, karena sebagian besar penduduk yang memiliki pendapatan tinggi menggunakan sumber daya pada kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, sedangkan sebagian lainnya yang memiliki pendapatan rendah tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan sumber daya tersebut.
4. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah
Ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, karena sebagian besar penduduk yang memiliki pendapatan rendah tidak memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti gizi, rumah, dan kesehatan.
5. Konflik sosial dan politik
Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan konflik sosial dan politik, karena sebagian besar penduduk yang memiliki pendapatan rendah merasa frustrasi dan marah terhadap pemerintah dan sistem sosial ekonomi yang dianggap tidak adil.
6. Keterbelahan dalam masyarakat
Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan keterbelahan dalam masyarakat, karena sebagian besar penduduk yang memiliki pendapatan tinggi hidup di kawasan elit, sedangkan sebagian lainnya yang memiliki pendapatan rendah hidup di kawasan kumuh.
7. Pengabaian terhadap kemampuan generasi mendatang
Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan pengabaian terhadap kemampuan generasi mendatang, karena sebagian besar penduduk yang memiliki pendapatan tinggi tidak peduli dengan masa depan generasi mendatang dan lebih peduli dengan keuntungan pribadi mereka sendiri.

Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kriminalitas

Menurut penelitian Azmi, (2024) menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kriminalitas bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun terdapat korelasi antara kedua variabel tersebut, namun faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, dan individu juga turut memengaruhi dinamika hubungan tersebut.

Dengan demikian, untuk memahami lebih lanjut mengenai hubungan ini diperlukan analisis yang lebih mendalam dan memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhinya.

Hubungan Kemiskinan terhadap Kriminalitas

Kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam hubungan dengan kriminalitas. Individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan mungkin mengalami tekanan ekonomi yang tinggi, yang dapat mendorong mereka untuk mencari cara yang ilegal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan juga dapat menciptakan lingkungan yang kurang stabil, yang dapat meningkatkan risiko terlibat kriminalitas (merampok, membegal) (Saputra 2023).

Menurut penelitian Kuciswara, (2021) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kriminalitas, artinya ketika persentase kemiskinan meningkat maka akan mendorong terjadinya tindakan kriminalitas di Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Moh. Dulhiah & Nurjanah (2018), yang mengatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kemiskinan dengan kriminalitas di Kota Bandung. Semakin banyak kemiskinan yang melanda kota Bandung, maka semakin tinggi tindakan kriminalitas. Hal ini dikarenakan kemiskinan yang rendah akan mengurangi tindakan kejahatan. Namun, apabila kemiskinan tinggi akan mengharuskan masyarakat untuk bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak melakukan tindakan kriminal, oleh karena itu akan menurunkan terjadinya kriminalitas.

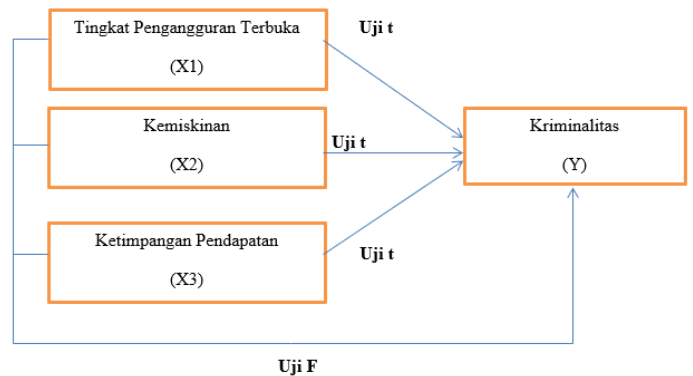
Hubungan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas

Ketimpangan pendapatan umumnya merupakan salah satu inti permasalahan dalam negara-negara berkembang. Distribusi pendapatan perseorangan sendiri merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga (Todaro & Smith, 2004). Terdapatnya pengaruh positif ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia dikarenakan faktor ekonomi yang merupakan faktor yang sangat klasik dan alasan utama seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

Seperti di kota besar tingkat ketimpangan pendapatannya sangat tinggi karena sebagian besar masyarakat yang datang kesana tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup sehingga baik sehingga banyak pendatang yang tidak bekerja dengan cukup layak dan hanya menambah kepadatan daerah itu sendiri. Sedangkan biaya hidup di perkotaan sangat

tinggi dan kebutuhan sehari-hari juga harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup sehingga kemiskinan sangat jelas terlihat didaerah Ibu kota, hal inilah yang mendorong orang-orang yang tidak memiliki keahlian untuk melamar pekerjaan yang lebih baik datang ke Ibu kota tanpa berpikir panjang mereka menjadi pelaku kriminalitas (Edwart, 2019).

Krangka konseptual



Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya diuji secara empiris, berdasarkan tujuan penelitian kerangka pemikiran terhadap masalah. Maka hipotesisnya sebagai berikut :

- H1 : Diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Provinsi Aceh.
- H2 : Diduga kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Provinsi Aceh.
- H3 : Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Provinsi Aceh.
- H4 : Diduga tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kriminalitas di Provinsi Aceh.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *time series* dengan kurun waktu 25 tahun yaitu tahun 1999-2023. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan pada penelitian maka peneliti mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Adapun data yang digunakan yaitu tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan kriminalitas di Provinsi Aceh Tahun 1999-2023.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini memakai teknik pengkajian perpustakaan dan mengambil data penelitian melalui website resmi www.bps.go.id untuk mengumpulkan data melalui bahan pustaka mencakup artikel ilmiah, jurnal, artikel, dan laporan pengakjian ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang di kaji.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang merupakan alat analisis statistik yang dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen (Susilana, 2015). Model data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu 25 tahun yaitu tahun 1999-2023. Adapun pengolahan data dengan *software eviews*. Pada penelitian model regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LOGKRM} = \alpha + \beta_1 \text{TPT} + \beta_2 \text{KEM} + \beta_3 \text{KP} + e$$

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Sebelum melakukan analisa regresi berganda dan pengujian hipotesis, maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linear yang baik (Mardiatmoko, 2020).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal atau tidak dengan analisis grafik dan uji statistik.

Pada pengujian ini, uji statistik yang digunakan untuk menilai normalitas pada penelitian ini adalah uji *jarque bera* (JB) dengan *histogram-normality test*. Pada tingkat signifikan 5% indikator yang digunakan untuk pengambilan keputusan data tersebut terdistribusi normal atau sebaliknya. Jika nilai probabilitas lebih besar (>) dari 0,05 maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil (<) dari 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal (Sari ., 2017).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Ketentuan dari uji Multikolinearitas adalah:

- Bila nilai kolerasi antar variabel antar variabel bebas > 0,80, maka dalam model tersebut ada indikasi Multikolinearitas.
- Bila nilai korelasi antar variabel bebas < 0,80, maka dalam model tersebut tidak ada indikasi Multikolinearitas (Azizah, 2021).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji asumsi terjadi atau tidaknya autokorelasi apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi dan absolut adalah nilai mutlak. Apabila variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka hal tersebut dinamakan homoskedastisitas. Sedangkan apabila variasi residualnya berbeda, maka dinamakan heterokedastisitas. Jika nilai signifikansi >0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikansi <0,05, maka terjadi heterokedastisitas (Qurnia , 2017).

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% (0,05).

Kriteria dari uji t, jika nilai signifikansi uji t >0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan. Jika nilai signifikansi uji t <0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen signifikan (Mardiatmoko, 2020)

Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Tingkatan yang

digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5%. Ketentuan dari uji F, jika nilai F-tabel <0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya semua variabel independen/bebas secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat. Dan jika F-tabel >0,05 maka H0 diterima H1 artinya, semua variabel independen/bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen/terikat (Mardiatmoko, 2020).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Merupakan parameter yang dipakai untuk mencerminkan variasi yang dijelaskan pada model regresi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui besar pengaruh variabel *independent* dengan variabel *dependent*. Nilai dari R² dilihat dari:

1. Jika nilai R² mendekati 0, maka kemampuan variasi variabel dependen terbatas.
2. Jika nilai R² mendekati 1, maka kemampuan variabel independen dalam mendeskripsikan variasi dependen sangat luas (Pasiza, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengolahan Data Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: LOG_KRM
Method: Least Squares
Date: 10/14/24 Time: 18:41
Sample: 1999 2023
Included observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	10.32700	1.421479	7.264965	0.000
PT_X1_	0.052892	0.058353	0.906413	0.375
KM_X2_	-0.121735	0.021617	-5.631371	0.000
KTP_X3_	0.687745	3.936365	0.174716	0.863
R-squared	0.712699	Mean dependent var	8.52962	
Adjusted R-squared	0.671656	S.D. dependent var	0.69947	
S.E. of regression	0.400806	Akaike info criterion	1.15496	
Sum squared resid	3.373554	Schwarz criterion	1.34998	
Log likelihood	-10.43710	Hannan-Quinn criter.	1.20905	
F-statistic	17.36466	Durbin-Watson stat	1.58714	
Prob(F-statistic)	0.000007			

Sumber: data diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diinterpretasikan dari analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{LOGKRM} = 10.32 + 0.05 \text{ TPT} - 0.12 \text{ KEM} + 0.68 \text{ KP} + e$$

Dari formulasi model di atas menunjukkan bahwa nilai variabel konstanta mempunyai koefisien sebesar 10.32 yang berarti jika variabel-variabel observasi tingkat pengangguran terbuka (TPT),

kemiskinan (KEM) dan ketimpangan pendapatan (KP) tetap, maka nilai kriminalitas sebesar 10.32.

1. Koefisien pengangguran terbuka (TPT) adalah sebesar 0.05 yang berarti apabila tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kriminalitas sebesar 0.05 persen.
2. Koefisien variabel kemiskinan (KEM) mempunyai nilai sebesar -0.12. Hal ini menunjukkan hubungan yang negatif. Artinya apabila kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka kriminalitas akan mengalami penurunan sebesar -0.12 persen.
3. Koefisien variabel ketimpangan pendapatan (KP) mempunyai nilai sebesar 0.68. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif. Artinya apabila ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka kriminalitas akan meningkat sebesar 0.68 persen.

Hasil Uji Multikolinearitas

Covariance Analysis: Ordinary
Date: 11/26/24 Time: 21:52
Sample: 1999 2023
Included observations: 25
Balanced sample (listwise missing value deletion)

Correlation t-Statistic	KRM	TPT	KM	KTP
KRM	0.469689 ----			
TPT	-0.223319 -1.074598	0.713180 ----		
KM	-0.575503 -3.300749	0.686145 4.423997	0.011509 ----	
KTP	-0.223897 -1.077527	-0.223512 -1.075573	-0.257277 -1.248773	0.000460 ----

Sumber: data diolah 2024

Berdasarkan nilai korelasi antar variabel bebas semua nilai korelasinya < 0,80, maka dalam model tersebut sudah terbebas dari indikasi multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.265252	Prob. F(2,19)	0.3049
Obs*R-squared	2.938278	Prob. Chi-Square(2)	0.2301

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat uji autokorelasi dengan menggunakan LM bahwa nilai *probability Obs*R-square* 0.23 > dari 0,05, hal ini menjelaskan bahwa tidak terjadinya masalah

autokorelasi.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.310174	Prob. F(9,15)	0.3092
Obs*R-squared	11.00306	Prob. Chi-Square(9)	0.2755
Scaled explained SS	6.761611	Prob. Chi-Square(9)	0.6619

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai prob. obs*R-square sebesar $0,27 > 0,05$ maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji heterokedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji heterokedastisitas.

Hasil pengujian t-Statistik (Uji t)

1. Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai t-statistik sebesar $0.90 < 1.71$ dengan nilai prob (tidak signifikan) sebesar $0.37 (> 0,05)$ maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kriminalitas di Provinsi Aceh.
2. Variabel kemiskinan memiliki nilai t-statistik sebesar $-5.63 < -1.71$ dengan nilai prob (signifikan) sebesar $0.00 (> 0,05)$ maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel kriminalitas di Provinsi Aceh.
3. Variabel ketimpangan pendapatan memiliki nilai t-statistik sebesar $0.17 < -1.71$ dengan nilai prob (tidak signifikan) sebesar $0.86 (> 0,05)$ maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kriminalitas di Provinsi Aceh.

Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Diketahui nilai F-statistik sebesar $17.3 > 3.44$ dengan nilai prob (f-statistik) sebesar $0.00 (< 0,05)$ maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan secara simultan (serentak) terhadap variabel kriminalitas.

Hasil Koefisien Determinasi (R²) dan Koefisien Korelasi (R)

- Diketahui nilai *adjusted R-Square* sebesar 0.6716 maka berkesimpulan bahwa variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam penelitian ini sebesar $67,16\%$.

- Nilai koefisien korelasi pada penelitian ini diperoleh dari $R = \sqrt{R^2} = \sqrt{0.6716} = 0.8195$, jadi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah hubungan erat secara positif karena nilai korelasi sebesar 0.8195 mendekati positif 1.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kriminalitas

Berdasarkan hasil regresi linear berganda bahwa variabel pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kriminalitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kurniawati, 2017) yang meneliti tentang Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Pengangguran dan Kepadatan Penduduk terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia dan menunjukkan hasil penelitian bahwa pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas, terjadinya penurunan pada pengangguran tidak mengurangi tingkat kriminalitas yang ada. Karena menurut Badan Pusat Statistik (2017) pengangguran terdidik menyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Dimana, orang yang berpendidikan tinggi memiliki pemikiran yang rasional sehingga kecil kemungkinannya untuk melakukan tindak kriminalitas, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang melanggar hukum.

Pengaruh Kemiskinan terhadap Kriminalitas

Berdasarkan hasil regresi linear berganda bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kriminalitas artinya setiap terjadi peningkatan pada kemiskinan akan mengakibatkan penurunan pada kriminalitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asyifa (2021) Setiap terjadi peningkatan kemiskinan menyebabkan penurunan pada kriminalitas. Secara teoritis kemiskinan bisa memberikan dampak negatif dan positif terhadap kriminalitas. Kemiskinan yang rendah akan mengurangi tindak kejahatan. Namun jika tinggi kemiskinan mengharuskan masyarakat bekerja keras agar memenuhi kehidupannya agar tidak melakukan tindak kriminal oleh karena itu akan menurunnya kriminalitas. meningkatkan kualitas manusia dengan meningkatkan tingkat kerja serta menyediakan pengetahuan khusus serta keterampilan dalam berbagai bidang agar meningkatnya produktivitas masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang memenuhi kriteria dalam dunia kerja yang akan mendorong ekonomi sehingga masyarakat yang sebelumnya yang tidak memiliki pekerjaan dapat mengisi waktunya yang

lebih efektif dan tidak langsung terjun dalam tindak kriminal.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas

Berdasarkan hasil regresi linear berganda bahwa variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kriminalitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Soraya, 2024) yang meneliti tentang Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2013-2023 dan menunjukkan hasil penelitian bahwa ketimpangan dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas melalui beberapa mekanisme, namun pengaruh positif yang tidak signifikan dapat dijelaskan oleh berbagai faktor penyeimbang. Pertama, meskipun ketimpangan menciptakan kesenjangan yang dapat mendorong individu dari kelompok yang kurang mampu untuk melakukan kejahatan sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, keberadaan kebijakan sosial yang efektif, seperti program bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan, dapat mengurangi tekanan ini. Kedua, peningkatan ketimpangan tidak selalu disertai dengan peningkatan kejahatan jika tingkat pengawasan dan penegakan hukum tinggi, serta jika masyarakat memiliki norma sosial yang kuat yang menolak perilaku kriminal.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas di Provinsi Aceh.
2. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas di Provinsi Aceh.
3. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas di Provinsi Aceh.
4. Tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan pengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Provinsi Aceh.

Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam mengatasi masalah pengangguran

sebaiknya pemerintah lebih banyak membuka lapangan pekerjaan baru yang menyerap banyak tenaga kerja, disamping meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan latihan gratis melalui Balai Latihan Kerja (BLK), memudahkan kebijakan regulasi tentang investasi sehingga memacu investor untuk membuka lapangan kerja baru. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap akan menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas.

2. Pemerintah diharapkan dapat terus melanjutkan program-program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara memperbesar anggaran untuk kesejahteraan kaum miskin. Memberikan bantuan kesejahteraan kepada masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dll. Dengan melakukan program kegiatan tersebut maka pemerintah dan polisi harus bekerja sama dengan masyarakat dalam meningkatkan keamanan. Perlu dilakukan patroli di beberapa tempat guna memberikan peningkatan keamanan pada daerah-daerah yang rawan terjadi kriminalitas.
3. Pemerintah diharapkan dapat lebih merata melakukan pembangunan baik daerah perkotaan maupun pedesaan. Pembangunan suatu daerah dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut sehingga daerah-daerah tersebut memiliki produk yang dapat diandalkan dan dapat menjamin kelangsungan produk tersebut sehingga ketimpangan antara daerah dan antar penduduk dapat ditekan. Dengan meratanya pembangunan, pendapatan perkapita juga akan terkena imbasnya sehingga ketimpangan pendapatan akan turun, sehingga dengan menurunkan ketimpangan akan menurunkan tingkat kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Andressony, Daniel (2024). "Analisis Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Di Provinsi

- Kalimantan Tengah.” *Borjuis: Journal of Economy* 2(3): 101–15.
- Asyifa Noor Rachmayani. (2021). Pengaruh Tingkat Putus Sekolah, Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 7(2), 147-154
- Audey, Ryan Pratama, and Ariusni Ariusni. (2019). “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 1(2): 653.
- Azizah. (2021). “Model Terbaik Uji Multikolinearitas Untuk Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Di Kabupaten Blora Tahun 2020.” *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* 4: 61–69.
- Azmi, Kurnia Nurul, Salsabila Putri Azzahra, and Vanesa Kusuma Dewi. (2024). “Analisis Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminalitas Di Kota Bekasi.” 2(3).
- Edwart, Adek Oktaviani, and Zul Azhar. (2019). “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 1(3): 759.
- H Syamsuddin HM. (2011). “Perhitungan Indeks Gini Ratio Dan Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2010.” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 1(4).
- <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--februari-2024.html>
- <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/42/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html>
- <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/2/MTAxIzI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>
- Karolinska, Beatrice, Irawati Panjaitan, and Renny Simamora. (2023). “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro* 11(2): 213–25.
- Kuciswara, Dita, Fivien Muslihatinningsih, and Edy Santoso. (2021). “Pengaruh Urbanisasi, Tingkat Kemiskinan, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Di Provinsi Jawa Timur.” *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 6(3): 1–9.
- Kunenengan, Resha M A, Daisy S M Engka, and Ita Pingkan F Rorong. (2023). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota Di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Selatan.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien* 23(3): 133–44.
- Kurniawati, putri. (2017). Pengaruh Ketimpangan, Kemiskinan, dan kepadatan Penduduk terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 01, 1–7.
- Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Masittah, Ellisa, and Muhammad Nasir. (2018). “Pengaruh Belanja Publik Terhadap Kemiskinan Dan Kriminalitas Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah* 3(3): 539–46.
- Muslim, Mohammad Rifqi. (2014). “Pengangguran Terbuka Dan Determinannya.” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 2* 15(2): 171–81.
- Nisa, Wulan Khoiru, Vivi Irawan Simanjuntak, Sri Kartika, and Arif Fadila. (2024). “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2022.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan* 1(3): 1–9.
- Palokoto, Tarina, Evi Yulia Purwanti, and Y. Bagio Mudakir. (2020). “Analisis Konsekuensi Ekonomi Akibat Kejahatan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 20(2): 146–59.
- Pamela, Queen. (2023). “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Jumlah Kriminalitas Di Jawa Timur Tahun 2014-2021.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 2(3) 1–89
- Pasiza, Ria, Sigit Nugroho, and Fachri Faisal. (2018). “Analisis Jalur Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas Di Indonesia.” : 1–8. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(2) 1–8.
- Putra, Andrian Dwi, Gracilia Stevi Martha, Muhammad Fikram, and Risni Julani Yuhan. (2021). “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018.” *Indonesian Journal of Applied Statistics* 3(2): 123.

- Qurnia Sari, Atmira, YL Sukestiyarno, and Arief Agoestanto. (2017). "Batasan Prasyarat Uji Normalitas Dan Uji Homogenitas Pada Model Regresi Linear." *Unnes Journal of Mathematics* 6(2): 168–77.
- Rahayu, Yunie.(2018). "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi." *EKONOMIS: Journal of Economics and Business* 2(1): 165.
- Ricardo, Rico, Ayu Muchlisah, and Feriansyah. (2023). "Pengaruh Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5: 1338–43.
- Saputra, Raihan. (2023). "Analisis Tingkat Pendidikan, Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di Bekasi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 3(4): 159–63.
- Sari, Yulia Adella. (2021). "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 10(2): 121–30.
- Sartika, Dina, and Leli Putri Ansari. (2022). "Fenomena Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Aceh Barat." *Regress: Journal of Economics & Management* 2(2): 236–44.
- Soraya, Ariq Rafi, and Muhammad Kurniawan. (2024). "Pengaruh Ketimpangan Ekonomi , Tingkat Kemiskinan , Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2013-2023 Data Registrasi Polri Kejadian Kejahatan Di Indonesia Periode 2012-2023 Menurut Statistik Kriminalit." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2(2): 270–84.
- Subrata, Bakhtiar Al Yunussy. (2018). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*: 1–13.
- Suparyanto dan Rosad (2020). "Tingkat Penawaran Kriminal." *Suparyanto dan Rosad* (2015 5(3): 248–53.
- Susilana, Rudi. (2015). "Metode Penelitian Sosial Kuantitatif." *Journal of Visual Languages & Computing* 11(3): 287–301.
- Syawal Ibraya, Nurfadilah, Sam'un Mukramin, and Fatimah Azis. (2023). "Penanggulangan Kriminalitas Di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab.Takalar." *TOBA (Journal of Tourism, Hospitality and Destination)* 2(2): 24–29.
- Utami, A. A., & Zahrudin, Z. (2022). Pengaruh Indeks Gini Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(4), 422.
<https://doi.org/10.30998/jabe.v8i4.13994>

